

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Keikutsertaan buruh tani tembakau di kabupaten Jember pada program jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum optimal, dapat dilihat dari data dari BPJS Ketenagakerjaan Jember dari 35.506 buruh tani tembakau yang terdaftar baru 15.000 orang dengan persentase 42%. Pemerintah kabupaten Jember pada tahun 2022 sudah mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 252.000.000 untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau di kabupaten Jember. Kepesertaan buruh tani tembakau di BPJS Ketenagakerjaan tidak berkelanjutan, dari data yang diperoleh dari 15.000 buruh tani yang didaftarkan dan dibayarkan iuran pertamanya oleh pemerintah daerah melalui DBHCHT, buruh tani yang melanjutkan kepesertaan hanya 178 Orang.
2. Manfaat program merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan buruh tani tetap melanjutkan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia No 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan sosial ketenagakerjaan, bupati Jember sudah membuat surat edaran kepada seluruh dinas-dinas yang ada di kabupaten Jember. BPJS Ketenagakerjaan masih kurang proaktif dalam mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada buruh tani tembakau. Dari hasil dilapangan BPJS Ketenagakerjaan baru melakukan sosialisasi baru beberapa kali saja.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah kabupaten Jember untuk dapat mengoptimalkan keikutsertaan buruh tani tembakau dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mengalokasikan dana bagi hasil cukai tembakau lebih banyak dari tahun sebelumnya guna meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau.
2. BPJS Ketenagakerjaan Jember harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada buruh tani tembakau agar buruh tani lebih memahami akan manfaat program.
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dari surat edaran bupati yang sudah dibuat untuk memastikan implementasi dari Instruksi Presiden tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan sosial ketenagakerjaan di kabupaten Jember.
4. Perlu dukungan dari pihak-pihak terkait seperti : dinas-dinas, tokoh masyarakat serta buruh tani tembakau dalam mensukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah disiapkan pemerintah.